**PERAN SERTA SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

***PRIVATE PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES ACCORDING TO
LAW NUMBER 17 OF 2019 CONCERNING WATER RESOURCES***

**Arafat Nasrulloh Musthofa
Martin Roestamy
Mohamad Ali Fulazzaky**

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Korespondensi : Arafat Nasrulloh Musthofa
e-mail: arathofa@gmail.com

**Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 16, No.
1, 2024
Hlm 13-23**

Abstract : *Water is a primary human need that God has given to all His creatures. Water is a source of needs and fulfillment of many people's needs. The management of water resources is held by the government to be used for the welfare of citizens according to the mandate of the 1945 Constitution. The research objectives are as follows: 1. To find out and analyze the tasks of the central government in dividing the management of natural resources both for the community and for private companies. 2. To find out and analyze the role of the private sector in water resources according to Law no. 17/2019 concerning Water Resources. The method is normative juridical study with qualitative approach using primary and secondary data. The results of the research are that water resources management involves various parties which often conflict and cause conflict. Therefore, good coordination is needed to unite the interests of the community and the government to produce an effective and efficient formulation of water resources management. The government plays a very important role in managing water resources so that all people get clean water in a fair and equitable manner to meet their daily needs.*

Keywords : *Management, Private, Water Law*

Abstrak : Air adalah kebutuhan primer manusia yang dikaruniakan Tuhan untuk semua makhluk-Nya. Air adalah sumber kebutuhan dan pemenuhan hajat banyak orang. Pengelolaan sumber daya air dipegang oleh pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan warga Negara menurut amanat dari UUD 1945. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas pemerintah pusat dalam membagi pengelolaan sumber daya alam baik untuk masyarakat amupun untuk perusahaan swasta 2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta swasta daya air menurut UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Metode Penelitian ini merupakan Yuridis Normatif dengan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil Penelitian adalah bahwa manajemen sumber daya air mengikutsertakan berbagai pihak yang tidak jarang bertentangan dan menyebabkan adanya konflik. Oleh karena itu dibutuhkan kordinasi yang baik untuk menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan formulasi manajemen sumber daya air yang efektif dan efisien. Pemerintah berperan sangat penting didalam pengelolaan sumber daya air agar semua masyarakat mendapatkan air bersih secara adil dan merata untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Kata Kunci : Hukum Air, Pengelolaan, Swasta

PENDAHULUAN

Air adalah sebuah sumber daya alam yang sangat vital untuk semua makhluk hidup. Air adalah sumber kehidupan dan kelangsungan manusia. Dengannya manusia dapat melakukan berbagai kegiatan dan mencukupi kebutuhan fisik dan rohaninya dimana tanpa air maka manusia akan sirna dan punah.¹ Kebutuhan akan air selalu meningkat bagi manusia semakin hari, tidak hanya pada saat jumlah manusia yang membutuhkan air meningkat, tetapi juga pada saat kebutuhan akan air semakin banyak dan beragam. Isu tentang air yang terbatas, baik secara jumlah dan mutunya adalah permasalahan yang sangat perlu diperhatikan tidak saja skala, skala nasional namun juga skala internasional. Oleh karena itu, sumber daya air harus dimanajemen dengan baik berdasarkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara terpadu.

Air sebagai kebutuhan primer manusia. Air dibutuhkan tidak saja untuk diminum dan masak, namun juga untuk air irigasi, media produksi, budidaya ikan, budidaya pertanian, media penghasil listrik dan juga pembangkit listrik tenaga air. Air dibutuhkan semua makhluk hidup dan lingkungan untuk mempertahankan ekosistemnya. Pada sebuah sistem sungai, disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, air diperlukan juga untuk menjaga stabilitas daerah aliran sungai dengan daya angkut dan endap sedimen serta untuk menjaga mutu lingkungan. Maka dari itu air dari segi jumlah, mutu, dan waktu sangat diharapkan untuk memastikan kelestarian alam dan manusia. Dengan peningkatan jumlah orang yang ada di dunia, maka daerah pemukiman dan pertanian semakin luas. Hal tersebut mengakibatkan penurunan mutu lingkungan, perubahan pola cuaca dan berkurangnya daerah resapan. Terjadi ketidakseimbangan antara

ketersediaan air dan pemanfaatan dalam mutu dan jumlah yang dibutuhkan.

Manajemen sumberdaya air di Indonesia mengalami permasalahan yang cukup rumit, dimana air memiliki banyak fungsi yaitu sosekbud yang diantaranya bisa saling berlawanan. Peningkatan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan perekonomian mengubah ketersediaan sumber daya air yang sangat signifikan. Pembukaan lahan untuk kebutuhan perluasan daerah pertanian, industri dan pemukiman yang tidak terkordinir dengan baik pada suatu rencana pengembangan spasial, menyebabkan terjadi degradasi lahan, tanah longsor, erosi dan banjir.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan pembangunan nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan pada semua masyarakat dan memberikan hidup yang sejahtera untuk semua warga Negara, meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata, memberikan pendidikan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kecerdasan, perdamaian yang berkelanjutan.²

Sebagaimana bidang pengelolaan SDA, pengelolaan sumber daya air memegang fungsi vital dalam pemenuhan kebutuhan semua orang. Maka dari itu, peraturan dan undang-undang menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengelola penggunaan dan manajemen sumber daya air.³ Hal ini sesuai dengan konteks penguasaan sumber daya alam secara nasional dalam Pasal 33 UUD 1945. Manajemen SDA Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan seperti berikut ini: (1) Ekonomi dikelola sebagai usaha kolektif menurut azas kekeluargaan; (2) Merupakan aspek penting untuk dikelola dengan baik karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara umum; (3) Tanah dan air beserta semua kekayaan didalamnya dimanfaatkan

¹ P. Raja Siregar, dkk, *Politik Air*, Jakarta: Walhi, 2014, Hlm. 9.

² Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E, (2023), 1–15.

³ Famela, A., Adiwijaya, A. Jaka S., & Surachman, A, 12.2 (2020), 122–30.

untuk kemakmuran rakyat secara efektif dan efisien; (4) Ekonomi nasional dilaksanakan menurut asas demokrasi ekonomi yang terintegrasi, adil, simultan, berbasis kesadaran lingkungan, mandiri serta menjaga keseimbangan perkembangan dan kemajuan bangsa dan Negara; (5) aturan tambahan terkait penyelenggaraan pasal ini diatur menurut aturan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa selama penggunaan air dengan hak guna. Untuk individu dan pertanian, jumlah dalam sistem diberikan kepada individu atau perusahaan. Ketetapan ini pada dasarnya bertendensi memberikan potensi terjadinya privatisasi (swastanisasi) dan komersialisasi yang menimbulkan kerugian bagi penduduk. PP No. 16 tentang Pengembangan Sistem Air Minum yang dikeluarkan pada tahun 2015 semakin menegaskan kuatnya peran swasta dalam penyediaan air minum, ketimbang konsumen menikmati air siap saji yang didistribusikan.

Oleh karena itu, air dan sumbernya harus dijaga dan dilestarikan, terlebih lagi air harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk umum secara optimal. Ini merupakan konsep kontrol negara. Pasal 2 UUBPP No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan yaitu bahwa tanah dan sumber daya alam yang ada di negara digunakan oleh rakyat, dipegang oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan hak untuk mengelola tanah dan memberikan kekuasaan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal 3(2) UU No. 11/1974:

- a) mengatur dan mengembangkan pemanfaatan air dan sumber air.
- b) Mempersiapkan, atau mengeluarkan izin menurut pengaturan air dan perencanaan pengelolaan irigasi dan perencanaan teknis.
- c) Mengatur, mengesahkan, dan mengizinkan penunjukan dan

penggunaan penghasil air dan/atau sumber air.

- d) Mengurus, melegalkan, dan/atau mengizinkan penggunaan air dan/atau sumber air.
- e) menetapkan dan mengurus tindakan hukum dan relasi hukum dari orang dan atau entitas hukum terkait air atau sumber air.

Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, pemerintah berusaha mengesahkan aturan pengelolaan air yaitu UU Sumber Daya Air. Air tidak saja berfungsi sosial namun juga lingkungan dan ekonomi. Fungsi air secara sosial dinyatakan dalam hak pakai air, yaitu menerima dan menggunakan air, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian, misalnya pertanian, memasak, yang didapatkan secara legal.

Pada saat yang sama, fungsi ekonomi dilihat dari hak guna air, termasuk hak mendapatkan dan menggunakan, termasuk untuk kebutuhan bahan baku produksi yang diperoleh, sumber daya komersial, dan bahan penolong untuk proses produksi. lisensi

Dalam pengelolaan di Indonesia, layanan public terkait air bersih dikelola oleh BUMD, dalam hal ini oleh PDAM. Kolaborasi dari BUMN dan BUMS dalam mengelola air minum pada layanan sektor publik untuk bersungguh-sungguh membantu kesejahteraan masyarakat dan negara.

Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan Presiden pada akhir 2022. Perppu yang digadang-gadang sebagai omnibus law yang mempermudah iklim investasi ini menuai beragam polemik di masyarakat, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada 2020.

Pembenahan iklim investasi diharapkan diatur dengan ketat untuk menjauhkan bayang-bayang swastanisasi atau privatisasi. Perppu ini nyatanya menguatkan kembali hak penduduk pada sumber air yang menjadi kewajiban dan

jaminan dari pemerintah. Pemenuhan kebutuhan pada suatu wilayah yang mengelola sumber daya air sebagai produk hukum dilakukan dengan terbitnya UU No. 17/2009 tentang Sumber Daya Air pasca dibatalkannya UU No. 7/ 2004, yaitu:

- a. bahwa air adalah kebutuhan primer mahluk hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk semua warga Negara Indonesia;
- b. Menimbang bahwa air merupakan komponen kehidupan yang menjadi kebutuhan banyak orang, yang dikendalikan dan diurus oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945. Indonesia;
- c. Oleh karena terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan pasokan yang kian besar, maka harus dimanajemen dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi pentingnya (fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi) secara serasi untuk menciptakan integrasi yang kuat dari berbagai wilayah, sektor, dan daerah untuk memenuhi kebutuhan air secara turun temurun;
- d. Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Irigasi No. 11/1974, setelah MK membatalkan UU Sumber Air No. 7/2004,⁴ masih banyak kekurangan dan gagal mengatur sumber daya air secara komprehensif sesuai ketentuan hukum, perkembangan dan kebutuhan Masyarakat, dengan demikian harus diubah;
- e. Menurut pertimbangan seperti dijelaskan pada huruf a, b, c, dan d perlu dilakukan pengaturan sumber daya air;

Permasalahan tentang kelangkaan air dan krisis air sudah dialami masyarakat

baik dari segi jumlah dan mutu. Kurangnya pemanfaatan teknologi sebagai salah satu kelemahan pemerintah untuk menggunakan sumber daya air.⁵ Kondisi ini memberikan peluang untuk beberapa kelompok mengambil peluang dengan memandang permasalahan ini sebagai sumber bisnis. Dimana pada faktanya, Negara seharusnya memperhatikan berbagai kelemahan dan potensi agar rakyat dapat sejahtera dengan sumber daya air yang ada.

Tidak jarang rakyat mempunyai akses terbatas pada air, terutama disebabkan berbagai faktor ketidaberdayaan, misal sosial, ekonomi. Budaya, kekuasaan dan lainnya. Salah satu daerah yang mengalaminya adalah Kabupaten Bogor dan perlu optimalisasi pendapatan serta pemanfaatann sumber-sumber daya yang ada termasuk kebutuhan air bersih.⁶ Dimana tidak sedikit penduduknya yang merupakan masyarakat ekonomi bawah. Ketersediaan air bersih merupakan permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat untuk dapat hidup dengan sejahtera. Meskipun terletak di daerah pegunungan yang sebenarnya banyak mata airnya, namun untuk mengalirkan air dari pegunungan tersebut hingga sampai kerumah-rumah penduduk membutuhkan biaya yang sangat besar yang maka menjadi salah satu penyebab utama hambatan penyediaan air bersih.⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang tugas Pemerintah pusat dalam membagi pengelolaan sumber daya alam baik untuk masyarakat maupun untuk perusahaan swasta serta peranan serta swasta dalam pengelolaan sumber daya air menurut UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air

⁴ Surachman, A, '11.2 (2019), 96–105.

⁵ Siswanto, D. J., & Agustin Nurahndayanti, '1.1 (2022), 10–20.

⁶ 9.2 (2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan aturan, pasal dan UU yang relevan dengan pengelolaan sumber daya air. Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari laporan, undang-undang, buku, jurnal, literature lainnya yang berkaitan dengan topic penelitian.⁸ Analisis penelitian dilakukan dengan mengkaitkan teori dan undang-undang pada tujuan penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Analisis tugas pengelolaan pemerintah pusat dalam membagi pengelolaan sumber daya alam baik untuk masyarakat maupun untuk perusahaan swasta.

Bahwa air adalah kebutuhan primer manusia yang dikaruniakan Tuhan untuk semua makhluk-Nya. Air adalah sumber kebutuhan dan pemenuhan hajat banyak orang. Pengelolaan air bersih dipegang oleh pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan warga Negara menurut amanat dari UUD 1945.

Sehingga untuk mengatasi masalah kekurangan air dan ketidakseimbangan distribusi yang semakin signifikan, maka sumber daya air perlu dimanajemen sesuai dengan fungsi-fungsinya yaitu ekonomi, sosial, lingkungan hidup, yang adaptif dan integrative untuk menghasilkan kesatuan dan sinergi dari wilayah, sektor, dan generasi dalam rangka mencukupi kebutuhan air untuk kesejahteraan.

Bahwa dengan diberlakukannya kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan setelah UU No. 7/2004 dibatalkan oleh MK, masih banyak insignifikansi dan belum mampu mengatur sumber daya air sesuai kebutuhan hukum public dan perkembangan masyarakat maka demikian

harus diganti bahwa menurut pertimbangan yang dijelaskan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan tentang Sumber Daya Air. Dasar hukum UU No. 17/2019 yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

Di satu sisi ketersediaan sumber daya air yang terbatas dan di sisi lain kebutuhan air yang terus meningkat mendorong kompetisi yang kritis dari penggunaan sumber daya air yang berpengaruh pada penguatan dan pengurangan nilai ekonomi air. Keadaan ini dapat mengakibatkan isu dan konflik pada beberapa pihak dan sektor terkait. Oleh karena itu perlu diselenggarakan perlindungan kepentingan masyarakat dalam mencukupi keperluan hariannya dan juga untuk irigasi pertanian. Maka dari itu, pasokan air untuk kebutuhan primer dan untuk perairan pertanian kecil menjadi pokok perhatian dari berbagai kebutuhan air yang lain.

Berdasarkan wewenang untuk mengelola sumber daya air, pemerintah pusat dan pemda diserahkan tanggung jawab dan tugas untuk mengelola dan mengurus sumber daya air, mencakup kebutuhan pokok untuk air bersih, air minum, pertanian dan perdagangan dan lingkungan.⁹ Disamping itu undang-undang ini memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya air pada pemerintah desa atau entitas dengan nama lain untuk mendukung pemerintah dalam mengelola sumber daya air secara efisien. Sekaligus memotivasi keikutsertaan dan prakarsa penduduk desa untuk menjaga dan mengurus pasokan air yang tersedia di wilayahnya. Tugas dan kewenangan negara dan/atau pemerintah provinsi dalam pengelolaan air bersih pada satu DAS dapat dialihkan sebagian kepada pengelola seperti kementerian/UPTD atau perusahaan negara/swasta. dalam bidang pengelolaan air. Posisi air sebagai sumber hidup secara alamiah bersifat dinamis dan

⁸ Harman, R., Asa'ari, A., & Afridawati, A., 'Istishab: Journal of Islamic Law, 1.2 (2020), 90-97.

⁹ Hudory, M., & Taufiq, M., '11.1 (2019), 50-60.

alirannya menurun ketempat yang lebih rendah secara otomatis tana adanya batasan administrasi. Pasokan air sesuai dengan siklus hidrologi yang berkaitan erat dengan kondisi cuaca sebuah daerah dimana persediaan air tidak tersebar secara rata pada setiap daerah dalam waktu yang sama. Untuk itu dibutuhkan manajemen air bersih secara komprehensif, dari hulu kehilir oleh pengelola. Dari penjelasan itu, tanggung jawab dan wewenang pemkab, pemda dan pengelola air bersih dilandasi oleh pasokan daerah tangkapan air. Agar air bersih dapat dikelola secara komprehensif, maka perlu dikembangkan dasar atau patokan untk para pengelola DAS dalam bentuk model manajemen air yang memiliki asas integrasi air permukaan dan air bawah tanah. Model manajemen diatur dalam koordinasi antara lembaga terkait. Model mnajemen sumber daya air ini lalu diinterpretasikan ke sebuah rencana manajemen sumber daya air. Perencanaan ini adalah rencana umum perlindungan sumber daya air, pemanfaatan, dan manajemen kerusakan air, yang dibuat secara kolektif dan terpadu menurut daerah tangkapan air. Rencana ini menjadi dasar pengembangan program pengelolaan air yang dituangkan dalam rencana aksi masing-masing instansi terkait.¹⁰

Pada prinsipnya, sumber daya air dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari masyarakat serta untuk pertanian kecil untuk kebutuhan nonkomersial yang tidak membutuhkan ijin penggunaan. Namun, apabila pemanfaatan sumber daya air dimaksudkan untuk mengubah keadaan natural dari SDA atau untuk kebutuhan kelompok yang membutuhkan air dalam kuantitas besar, maka pemanfaatannya harus melalui izin menggunakan SDA untuk tujuan non-komersial. Pemanfaatan air untuk irigasi petani kecil juga dapat juga

melalui ijin pemanfaatan umber air untuk tujuan nonkomersial, jika ternyata mengubah keadaan alamiah sumber air atau jika itu dimanfaatkan oleh sebuah peternakan kecil, pertanian skala besar dalam kondisi luar ruangan terhadap sistem irigasi yang ada. Pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan komersial adalah dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya air bagi kemakmuran manusia dengan berfokus pada kepentingan public dan fungsi sosial sumber daya air dan suistainabilitas lingkungan. Di wilayah tertentu, berdasarkan rencana usaha dan izin yang dikembangkan melalui konsultasi publik, cadangan air dapat digunakan untuk tujuan komersial oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah, perusahaan swasta dan/atau perorangan. menggunakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhannya. Dewan SDA Provinsi). Sedangkan kelompok TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) dapat dikembangkan disekitar DAS. Sejak tahun 2008 telah dibentuk DSDANasional dan 27 DSDAProv. Sejak tahun 2009 telah terbentuk 47 TKPSDA WS (terdiri dari 39 TKPSDA WS Pusat dan 8 TKPSDA WS Provinsi). Selanjutnya, juga butuh dikembangkan model pengelolaan DAS sebagai kerangka dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi inisiatif pengelolaan sumber daya alam. Mengenai definisi model pengelolaan sumber daya alam, pada April 2014, dari 63 WS pemerintah negara bagian, 29 model pengelolaan sumber daya alam ditetapkan sebagai WS, 6 model pengelolaan sumber daya alam ditetapkan sebagai WS. sedang dalam tahap pendefinisian, 9 model sedang dibahas di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum, 18 model sedang diperbaiki oleh pemerintah pusat. Ada 5 program dalam rencana pengelolaan SDA yaitu:

- a. Pelestarian SDA
- b. Pengembangan SDA
- c. Pengawasan dan kendali pada kerusakan air

¹⁰ Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

- d. Pengembangan dan pembaharuan peranan sipil, pemerintah dan swasta.
- e. Ketersediaan dan keterbukaan informasi/data terkait SDA

Indonesia mempunyai sumber daya air yang sangat melimpah berada pada posisi kelima dunia dengan cadangan sekitar + 3900 miliar m³/tahun. Tetapi distribusi air yang tidak rata menyebabkan tidak sedikit pula daerah yang mengalami kekurangan air dan tandus sementara daerah lain airnya sangat berlimpah. Maka dari itu pemerintah perlu mengelola air dengan efektif dan efisien sesuai dengan konsep warung jamu yaitu waktu, ruang, jumlah dan mutu serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan. Dan peran TKPSDA pusat dan provinsi sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan rekomendasi terhadap masalah manajemen sumber air terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat sekitar perusahaan PT.X tentang manajemen air minum maka tidak sedikit yang menyebutkan bahwa mereka mengetahui penggunaan. Selanjutnya peneliti juga menanyakan apakah para informan mengetahui sumber air bersih yang disediakan baik untuk minum maupun untuk kebutuhan yang lainnya. Informan menyatakan tidak tahu. Pada pertanyaan tentang apakah bapak/ibu mengetahui air bersih tersebut dimanfaatkan untuk apa saja jawaban yang diberikan informan adalah tidak. Untuk pertanyaan apakah di lingkungan bapak/ibu ada perusahaan yang mengelola air minum, Informan menjawab ada. Pada pertanyaan apakah setahu bapak/ibu darimana perusahaan tersebut mendapatkan sumber air untuk diproduksi menjadi air kemasan yang di jual ke masyarakat. Mereka menjawab ya. Kemudian informan juga ditanyakan apakah menurut bapak/ibu perusahaan air minum tersebut

menggunakan air sungai, Informan menjawab tidak. Selanjutnya informan juga ditanyakan tentang apakah perusahaan air minum tersebut melaksanakan AMDAL dalam memproduksi air minum tersebut, Jawaban informan adalah tidak. Pada pertanyaan apakah bapak/ibu mengetahui selama perusahaan air minum tersebut pernah terjadi Complaine dari masyarakat sekitar terkait Sumber Daya Air yang diambil untuk usaha air minum tersebut, Informan juga menjawab tidak. Selanjutnya pada pertanyaan apakah bapak/ibu mengetahui perusahaan tersebut pernah kekurangan Sumber daya Air, Informan menjawab mungkin. Dan terakhir pada pertanyaan apakah bapak/ibu yakin bahwa perusahaan air minum tersebut menggunakan air yang benar-benar bersih dan higienis. Para informan menjawab ya.

B. Analisis peran serta swasta dalam pengelolaan sumber daya air menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pemerintah meningkatkan pembangunan dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha dimana pihak swasta akan didorong terus untuk berperan sebagai pengelola. Tujuannya adalah agar pihak pengelola dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat memperoleh akses air minum, air bersih, air irigasi, air industri dan lainnya dengan penambahan jaringan layanan air bersih perpipaan oleh perusahaan pengelola yaitu PAM dan pihak swasta. Mau tidak mau pemerintah harus berkerjasama dengan swasta untuk mencapai program pembangunan sehingga tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berasaskan UUD 1945 bisa diraih secara optimal.

PUU No. 17/2019 memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan sumber daya air. Secara hukum, sumber daya air dipegang oleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat

secara optimal. Selain itu rakyat juga berhak untuk mendapatkan prioritas penggunaan air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebagai prioritas I, untuk pertanian sebagai prioritas II dan untuk perdagangan sebagai prioritas III.

Peraturan ini juga menjelaskan tentang peranan penduduk dalam mengelola sumber daya air yang menjadi hak bersama.

- a) menggunakan sumber air
- b) menggunakan air untuk kebutuhan minimum sehari-hari, untuk petani kecil dan untuk tujuan non-komersial.
- c) manfaat pengelolaan sumber daya air.
- d) pengelolaan yang tepat dari kerugian yang terkait dengan penggunaan sumber daya air
- e) menerima informasi tentang manajemen SDA
- f) berbicara tentang rencana manajemen air yang diterbitkan pada periode tertentu berdasarkan keadaan sekitar
- g) menyampaikan laporan dan keluhan kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian terkait pengelolaan sumber daya air.
- h) mengajukan pengaduan ke pengadilan tentang berbagai masalah sumber daya air yang mengancam jiwa.

Disamping hak untuk menggunakan sumber daya air, publik juga mempunyai kewajiban terkait manajemen sumber daya air yaitu:

- a) memberikan perlindungan dan melakukan pemeliharaan fungsi SDA.
- b) Memproteksi dan melindungi infrastruktur SDA.
- c) Mengendalikan penggunaan air.
- d) memantau dan mencegah pencemaran air

- e) menyelenggarakan restorasi lingkungan hidup akibat kegiatan yang ditimbulkannya.
- f) menyediakan akses masyarakat terhadap SDA dari sumber air yang terletak di lahan yang dikuasainya
- g) kemampuan pengguna air lainnya untuk memasok air melalui lahan yang mereka kuasai
- h) berfokus pada kepentingan publik.
- i) melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila masyarakat ikut serta dalam manajemen SDA, diharapkan SDA dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan secara merata untuk semua rakyat Indonesia. Perlu adanya pembatasan penggunaan sumber daya air apabila diketahui ada dampak yang merugikan secara signifikan terhadap penduduk disekitar sumber daya air.

Perlu sistem pengelolaan yang lebih transparan antara pihak pemerintah dan pihak swasta sehingga sumber daya air yang dikelola dapat difungsikan sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan semata untuk komersialisasi dan privatisasi. Sebagaimana UU Sumber Daya Air No. 17/2019 mencabut UU Pengairan No. 11/1974 dan dinyatakan tidak berlaku (Riigi Teataja 1974 No. 65, Tambahan Riigi Teataja 3046). Meskipun UU Air No. 11/1974 diberlakukan kembali setelah MK membatalkan UU Sumber Daya Air No. 7 2004, namun masih banyak kekurangan dan pengelolaan sumber daya air belum dapat diatur secara komprehensif mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin massif dan beragam. Berdasarkan pengetahuan alamiah, air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan setara dengan api, udara dan tanah. Sebagai patokan yaitu UU Sumber Daya Air No. 17 /2019 adalah karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang sangat besar, sehingga air bersih harus diurus dan

dimanajemen sesuai dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sehingga dapat menciptakan sinergi dan integrasi lintas wilayah, sektor dan generasi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena air sebagai sumber kehidupan dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh UUD 1945 RI. Pada prinsipnya, sumber daya air dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari masyarakat serta untuk pertanian kecil untuk kebutuhan nonkomersial yang tidak membutuhkan izin penggunaan. Maka dapat dilihat melalui beberapa interpretasi bahwa pertambangan di sektor swasta tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena swasta tidak memiliki kontrol penuh atas mineral atau batubara. Kepemilikan atau penguasaan sumber daya mineral atau batubara tetap berada pada negara yang berhak mengatur dan mengurus, mengurus dan menguasai secara bersama-sama berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

Manajemen sumberdaya air di Indonesia mengalami permasalahan yang cukup rumit, dimana air memiliki banyak fungsi yaitu sosekbud yang diantaranya bisa saling berlawanan. Peningkatan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan perekonomian mengubah ketersediaan sumber daya air yang sangat signifikan. Pembukaan lahan untuk kebutuhan perluasan daerah pertanian, industri dan pemukiman yang tidak terkordinir dengan baik pada suatu rencana pengembangan spasial, menyebabkan terjadi degradasi lahan, tanah longsor, erosi dan banjir.

Apabila masyarakat ikut serta dalam pengurusan sumber daya air, maka sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat menurut konstitusi. UU Sumber Daya Air No. 17/2019 mencabut UU Pengairan No. 11/1974 dan dinyatakan tidak berlaku (Riigi Teataja 1974 No. 65, Tambahan Riigi Teataja 3046). Meskipun UU Air No.11/1974 diberlakukan kembali setelah MK membatalkan UU SDA No. 7/2004, namun masih banyak kekurangan dan pengelolaan sumber daya air belum dapat diatur secara komprehensif mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin massif dan beragam.

Berdasarkan pengetahuan ilmiah, air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan setara dengan api, udara dan tanah. Sebagai patokan yaitu UU Sumber Daya Air No. 17 /2019 adalah karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang sangat besar, sehingga air bersih harus diurus dan dimanajemen sesuai dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sehingga dapat menciptakan sinergi dan integrasi lintas wilayah, sektor dan generasi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena air sebagai sumber kehidupan dan akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan oleh UUD 1945 RI. Republik. Dari penjelasan di atas dapat dilihat melalui beberapa interpretasi bahwa pertambangan di sektor swasta tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena swasta tidak memiliki kontrol penuh atas mineral atau batubara. Kepemilikan atau penguasaan sumber daya mineral atau batubara tetap berada pada negara yang berhak mengatur dan mengurus, mengurus dan menguasai secara bersama-sama berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Bahwa pihak swasta bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan penduduk dan tidak untuk mendapatkan keuntungan bisnis dari privatisasi semata. Peraturan ini juga menjelaskan tentang peranan penduduk

dalam mengelola sumber daya air yang menjadi hak bersama.

Pemerintah meningkatkan pembangunan dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha dimana pihak swasta akan didorong terus untuk berperan sebagai pengelola. Tujuannya adalah agar pihak pengelola dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat memperoleh akses air minum, air bersih, air irigasi, air industri dan lainnya dengan penambahan jaringan layanan air bersih perpipaan oleh perusahaan pengelola yaitu PAM dan pihak swasta. Mau tidak mau pemerintah harus berkerjasama dengan swasta untuk mencapai program pembangunan sehingga tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berasaskan UUD 1945 bisa diraih secara optimal.

Bahwa pihak swasta dan pemerintah harus mengelola sumber daya air berdasarkan tujuan penggunaan sumber air, air untuk kebutuhan minimum sehari-hari, untuk petani kecil dan untuk tujuan non-komersial. Manfaat pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan yang tepat dari kerugian yang terkait dengan penggunaan sumber daya air. Pihak swasta juga harus selalu memperbaharui informasi tentang manajemen SDA yang efektif sesuai dengan kondisi yang ada diwilayah manajemennya. Membuat rencana manajemen air yang diterbitkan pada periode tertentu berdasarkan keadaan sekitar. Pihak swasta harus menyampaikan laporan dan keluhan kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian terkait pengelolaan sumber daya

air. Sementara itu masyarakat sebagai penduduk dan pengguna sumber daya air apabila dirasa perlu dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan tentang berbagai masalah sumber daya air yang mengancam jiwa.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah bahwa perlu kerjasama yang baik dan efektif dari berbagai pihak terkait didalam pengelolaan sumber daya air sehingga semua kebutuhan masyarakat akan air bersih, air minum, air pertanian, air industri dapat dipenuhi secara optimal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan pemerintah desa harus mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan segalanya sebagaimana diatur menurut UUD 1945 sehingga semua rakyat dapat terpenuhi kebutuhan air bersih untuk berbagai kebutuhan sehari-hari dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata.

Perlu adanya pembatasan penggunaan sumber daya air apabila diketahui ada dampak yang merugikan secara signifikan terhadap penduduk disekitar sumber daya air. Perlu sistem pengelolaan yang lebih transparan antara pihak pemerintah dan pihak swasta sehingga sumber daya air yang dikelola dapat difungsikan sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan semata untuk komersialisasi dan privatisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2013
- Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E, 'PRIVATISASI BUMN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. JURNAL ILMIAH LIVING LAW', 15.11 (2023), 1-15

- Famela, A., Adiwijaya, A. jaka S., & Surachman, A, 'MODEL PENGELOLAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DI INDONESIA.', *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 12.2 (2020), 122-30
- Harman, R., Asa'ari, A., & Afridawati, A, 'PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DAN YURIDIS NORMATIF', *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 90-97
- Hudory, M., & Taufiq, M, 'URGENSI ETIKA BISNIS DALAM WUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.', *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11.1 (2019), 50-60
- Liana, N, 'OPTIMIZATION OF INCREASED ORIGINAL INCOME REGISTERED TO TOURISM CITY BOGOR AND DISTRICT BOGOR.', *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 9.2 (2017)
- P. Raja Siregar, dkk, *Politik Air*, Jakarta: Walhi, 2014
- Siswanto, D. J., & Agustin Nurahndayanti, 'PELATIHAN PEMASANGAN POMPA HIDRAM DALAM RANGKA MENGATASI KEKURANGAN AIR BERSIH DI WILAYAH SUMBA TIMUR', *JURNAL NAGARA BHAKTI*, 1.1 (2022), 10-20
- Surachman, A, 'PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.', *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 11.2 (2019), 96-105